



Komunikasi Kebencanaan Berbasis Kearifan Lokal (Studi Kasus Banjir Bandang dan Longsor Aceh Tengah dan Bener Meriah)

Makmur Jaya

Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
IAIN Takengon, Aceh, Indonesia

Email: makmurgayocanto@gmail.com

Abstract: *The flash floods and landslides that occurred in Central Aceh and Bener Meriah Regencies demonstrate that disaster issues are not only related to natural factors but are also influenced by community social communication patterns. This study aims to analyze disaster communication based on local wisdom to improve preparedness, emergency response, and recovery of disaster-affected communities. The study used a qualitative approach with a case study method. Data collection was conducted through in-depth interviews with traditional leaders, religious leaders, village officials, and affected communities, as well as field observations and documentation studies. The results indicate that the local wisdom of the Gayo community, such as the role of the village reje, mosque imam, customary deliberations, and the value of maintaining natural balance, serves as an effective and trusted disaster communication medium. However, this local wisdom has not been optimally integrated into the formal disaster communication system of the local government. This study recommends strengthening the synergy between modern communication and local wisdom as a sustainable and contextual disaster communication strategy.*

Keywords: *flash flood; communication; local wisdom; disaster; landslide*

Abstrak: Bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah menunjukkan bahwa persoalan kebencanaan tidak hanya berkaitan dengan faktor alam, tetapi juga dipengaruhi oleh pola komunikasi sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komunikasi kebencanaan berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan kesiapsiagaan, respons darurat, dan pemulihan masyarakat terdampak bencana. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, aparat kampung, dan masyarakat terdampak, serta observasi lapangan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal masyarakat Gayo, seperti peran reje kampung, imam masjid, musyawarah adat, serta nilai menjaga keseimbangan alam, berfungsi sebagai media komunikasi kebencanaan yang efektif dan dipercaya masyarakat. Namun, kearifan lokal tersebut belum terintegrasi secara optimal dalam sistem komunikasi kebencanaan formal pemerintah daerah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sinergi antara komunikasi modern dan kearifan lokal sebagai strategi komunikasi kebencanaan yang berkelanjutan dan kontekstual.

Kata kunci: *banjir bandang; komunikasi; kearifan lokal; kebencanaan; longsor*

1. LATAR BELAKANG

Wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah merupakan kawasan rawan bencana hidrometeorologi, khususnya banjir bandang dan longsor. Bencana besar yang terjadi pada akhir tahun 2025 menunjukkan bahwa dampak bencana tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga sangat ditentukan oleh efektivitas komunikasi kebencanaan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis praktik komunikasi kebencanaan sebelum bencana, sesudah bencana, dan komunikasi berkelanjutan dengan menitikberatkan pada peran kearifan lokal masyarakat Gayo sebagai modal sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, analisis laporan kebencanaan, serta penelusuran narasi media. Hasil kajian menunjukkan bahwa komunikasi

kebencanaan yang mengintegrasikan nilai budaya lokal, tokoh adat, dan institusi keagamaan mampu meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat solidaritas sosial, serta mendukung proses pemulihan pascabencana. Artikel ini merekomendasikan integrasi kearifan lokal ke dalam kebijakan komunikasi kebencanaan sebagai strategi berkelanjutan di daerah rawan bencana.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di dunia. Letak geografis, kondisi geologis, serta perubahan iklim global menjadikan berbagai wilayah rentan terhadap bencana alam, termasuk banjir bandang dan longsor. Provinsi Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, termasuk wilayah dengan topografi pegunungan dan curah hujan tinggi yang berpotensi besar mengalami bencana hidrometeorologi.

Bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi pada akhir tahun 2025 di kedua kabupaten tersebut mengakibatkan kerusakan infrastruktur, terputusnya akses transportasi, serta ribuan warga terdampak. Dalam situasi ini, komunikasi kebencanaan memegang peran krusial dalam menentukan efektivitas mitigasi, respons darurat, dan pemulihan. Komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai instrumen membangun kepercayaan, mengelola emosi publik, dan memperkuat kohesi sosial.

Sejumlah penelitian menegaskan bahwa kegagalan komunikasi sering memperparah dampak bencana, sementara komunikasi yang efektif dapat menyelamatkan nyawa dan mempercepat pemulihan (Haddow et al., 2017). Namun, banyak model komunikasi kebencanaan masih bersifat top-down dan kurang mempertimbangkan konteks budaya lokal. Oleh karena itu, artikel ini mengkaji komunikasi kebencanaan berbasis kearifan lokal masyarakat Gayo sebagai pendekatan alternatif yang kontekstual dan berkelanjutan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana alam yang tinggi, termasuk banjir bandang dan tanah longsor. Kondisi geografis, curah hujan tinggi, serta perubahan tata guna lahan menjadi faktor utama meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi. Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah yang berada di wilayah dataran tinggi Gayo termasuk daerah yang rentan terhadap kedua jenis bencana tersebut.

Dalam konteks kebencanaan, komunikasi memiliki peran strategis pada seluruh fase bencana, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca-bencana. Komunikasi yang tidak efektif dapat memperbesar risiko korban jiwa dan kerugian sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komunikasi yang tidak hanya berbasis teknologi dan kebijakan formal, tetapi juga memperhatikan konteks sosial budaya masyarakat setempat.

Masyarakat Gayo memiliki kearifan lokal yang berfungsi sebagai pedoman hidup, termasuk dalam menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam. Nilai-nilai adat, peran

tokoh adat dan agama, serta bahasa simbolik dalam ungkapan lokal menjadi bagian penting dari sistem komunikasi sosial. Penelitian ini memfokuskan kajian pada peran komunikasi kebencanaan berbasis kearifan lokal masyarakat Gayo dalam menghadapi banjir bandang dan longsor di Aceh Tengah dan Bener Meriah

2. KAJIAN TEORITIS

a. Komunikasi Kebencanaan

Komunikasi kebencanaan merupakan proses penyampaian informasi, pengetahuan, dan peringatan yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Komunikasi ini mencakup penyebaran informasi mitigasi, sistem peringatan dini, koordinasi saat tanggap darurat, dan komunikasi pemulihan.

b. Kearifan Lokal dan Modal Sosial

Kearifan lokal adalah nilai, norma, dan praktik sosial yang berkembang dalam suatu komunitas sebagai hasil adaptasi terhadap lingkungan. Dalam kebencanaan, kearifan lokal berfungsi sebagai modal sosial yang memperkuat kepercayaan, solidaritas, dan partisipasi masyarakat.

c. Kearifan Lokal Masyarakat Gayo

Masyarakat Gayo memiliki struktur adat yang kuat, seperti reje kampung, petue, dan imam masjid. Nilai adat menekankan pentingnya menjaga alam sebagai amanah yang harus dipelihara. Kearifan ini berpotensi menjadi dasar komunikasi kebencanaan yang kontekstual dan mudah dipahami masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, Provinsi Aceh.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, aparat kampung, dan masyarakat terdampak bencana, observasi lapangan, serta studi

dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh adat dan tokoh agama memiliki peran penting dalam komunikasi kebencanaan. Pesan-pesan kebencanaan yang disampaikan melalui musyawarah kampung, khutbah Jumat, dan pengajian lebih mudah diterima masyarakat karena memiliki legitimasi sosial dan religius. Seperti yang dilakukan oleh Imam Masjid Dalam masyarakat Gayo, **Imam Masjid** (sering disebut *imem*) memiliki posisi strategis tidak hanya sebagai pemimpin ibadah, tetapi juga sebagai **komunikator moral dan ekologis**. Pesan-pesan keagamaan yang disampaikan imam masjid memiliki legitimasi tinggi karena bersumber dari ajaran Islam dan diperkuat oleh nilai adat setempat. Oleh karena itu, komunikasi imam masjid menjadi instrumen penting dalam membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga alam.

Imam masjid di wilayah Gayo secara tradisional menyisipkan pesan-pesan **penjagaan alam** dalam khutbah Jumat, ceramah pengajian, dan pengajian kampung. Alam diposisikan sebagai **amanah dari Allah** yang wajib dijaga, sebagaimana konsep *khalifah fil ardh*. Penebangan hutan secara liar, perusakan daerah aliran sungai, dan pembukaan lahan di lereng curam sering disampaikan sebagai bentuk *kezaliman terhadap ciptaan Allah*. Bahasa yang digunakan imam umumnya **bahasa Gayo atau bahasa Indonesia bercampur Gayo**, sehingga pesan mudah dipahami dan terasa dekat dengan kehidupan jamaah. Pendekatan ini membuat dakwah lingkungan tidak terasa menggurui, melainkan sebagai nasihat orang tua kepada keluarga.

Penggunaan bahasa Gayo dan simbol adat dalam komunikasi kebencanaan menciptakan kedekatan emosional serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap imbauan kebencanaan. Nilai menjaga hutan, sungai, dan tanah sering dikaitkan dengan tanggung jawab moral dan agama.

a. komunikasi Tokoh adat Gayo dalam menjaga alam

Tokoh adat Gayo memandang alam bukan sekadar ruang ekonomi, melainkan **entitas hidup yang memiliki hubungan moral dan spiritual dengan manusia**. Dalam pandangan adat Gayo, alam harus diperlakukan dengan *tertib, seimbang, dan penuh tanggung jawab*. Prinsip ini sering dirangkum dalam ungkapan adat bahwa manusia hidup *“bersama alam,*

bukan di atas alam”. Kerusakan alam diyakini sebagai akibat dari pelanggaran nilai adat, yang pada akhirnya akan “dibalas” oleh alam melalui bencana seperti banjir bandang dan longsor.

Menurut para tetua adat Gayo, hutan di kawasan pegunungan dan hulu sungai memiliki fungsi utama sebagai **penyangga kehidupan**. Oleh karena itu, wilayah hulu tidak boleh dieksploitasi secara serampangan. Penebangan hutan tanpa aturan adat dipandang sebagai tindakan yang melanggar *sumang* (larangan adat) karena menghilangkan pelindung air dan tanah. Tokoh adat sering mengingatkan bahwa “jika hulu rusak, maka hilir akan menangis,” sebuah metafora yang menegaskan hubungan sebab-akibat antara kerusakan alam dan bencana di permukiman.

Dalam struktur adat Gayo, terdapat konsep musyawarah kampung (*sarak opat*) yang melibatkan reje (kepala kampung), petue (penasehat adat), imem (tokoh agama), dan rakyat. Tokoh adat menekankan bahwa setiap aktivitas yang berdampak pada alam—seperti pembukaan lahan, pengelolaan kebun, atau pemanfaatan sungai—seharusnya dibicarakan dalam musyawarah. Mekanisme ini berfungsi sebagai **sistem komunikasi ekologis tradisional** untuk mencegah kerusakan lingkungan sejak dini.

Tokoh adat Gayo juga menekankan pentingnya **batas alam** (*bebalingen*) yang tidak boleh dilanggar. Sungai memiliki sempadan, gunung memiliki zona larangan, dan hutan memiliki kawasan yang dianggap “keramat” (**sakral**). Ketika batas-batas ini diabaikan, menurut pandangan adat, keseimbangan alam akan terganggu. Dalam konteks banjir bandang dan longsor di Aceh Tengah dan Bener Meriah, tokoh adat menilai bahwa banyak bencana dipicu oleh **hilangnya kearifan dalam membaca tanda-tanda alam**, seperti perubahan aliran air, bunyi tanah, atau perilaku hewan.

Selain itu, tokoh adat Gayo melihat menjaga alam sebagai bagian dari **amanah keagamaan**. Alam adalah titipan Tuhan yang harus dijaga untuk generasi mendatang. Oleh karena itu, pesan menjaga lingkungan sering disampaikan bersamaan dengan nasihat keagamaan di meunasah dan forum adat. Pendekatan ini memperkuat legitimasi pesan lingkungan karena bersandar pada dua otoritas sekaligus: adat dan agama.

Dalam konteks komunikasi kebencanaan, pandangan tokoh adat Gayo ini berperan penting sebagai **narasi lokal yang membangun kesadaran ekologis**. Pesan-pesan adat lebih mudah diterima masyarakat karena lahir dari pengalaman kolektif dan sejarah panjang hidup berdampingan dengan alam. Oleh sebab itu, integrasi pandangan tokoh adat Gayo dalam kebijakan mitigasi bencana dipandang sebagai strategi yang efektif dan berkelanjutan.

1. Dakwah Lingkungan dalam Khutbah dan Pengajian

Imam masjid di wilayah Gayo secara tradisional menyisipkan pesan-pesan **penjagaan alam** dalam khutbah Jumat, ceramah pengajian, dan pengajian kampung. Alam diposisikan sebagai **amanah dari Allah** yang wajib dijaga, sebagaimana konsep *khalifah fil ardh*. Penebangan hutan secara liar, perusakan daerah aliran sungai, dan pembukaan lahan di lereng curam sering disampaikan sebagai bentuk *kezaliman terhadap ciptaan Allah*.

Bahasa yang digunakan imam umumnya **bahasa Gayo atau bahasa Indonesia bercampur Gayo**, sehingga pesan mudah dipahami dan terasa dekat dengan kehidupan jamaah. Pendekatan ini membuat dakwah lingkungan tidak terasa menggurui, melainkan sebagai nasihat orang tua kepada keluarga.

2. Integrasi Nilai Islam dan Adat Gayo

Ciri khas komunikasi imam masjid di Gayo adalah **integrasi nilai agama dan adat**. Imam tidak hanya mengutip ayat Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga mengaitkannya dengan ungkapan adat seperti "*uten bertene belang berpancang*" sebagai simbol kewajiban menjaga batas alam. Dengan demikian, pelanggaran lingkungan tidak hanya dipandang sebagai dosa agama, tetapi juga sebagai **pelanggaran adat** (*sumang*). Strategi ini memperkuat daya tekan pesan, karena masyarakat Gayo memiliki ikatan emosional yang kuat terhadap adat dan agama secara bersamaan.

3. Komunikasi Preventif Sebelum Musim Hujan

Menjelang musim hujan, imam masjid sering menjadi **komunikator preventif kebencanaan**. Dalam doa bersama, khutbah, dan pengumuman masjid, imam mengingatkan jamaah untuk:

- Membersihkan saluran air,
- Tidak membuka lahan baru di kawasan rawan longsor,
- Waspada terhadap tanda-tanda alam.

Masjid berfungsi sebagai **pusat informasi komunitas**, terutama di daerah yang minim akses media digital. Komunikasi ini bersifat persuasif dan berbasis moral, bukan instruktif semata.

4. Peran Imam Masjid Pasca Bencana

Setelah bencana banjir bandang atau longsor terjadi, komunikasi imam masjid beralih pada fungsi **penguatan psikososial**. Imam menyampaikan pesan kesabaran (*sabr*), kebersamaan (*ta'awun*), dan introspeksi ekologis, tanpa menyalahkan korban.

Pesan-pesan tersebut membantu meredakan trauma dan menumbuhkan solidaritas sosial. Selain itu, imam sering menjadi mediator dalam penggalangan bantuan dan koordinasi gotong royong antarwarga.

5. Imam Masjid sebagai Agen Komunikasi Berkelanjutan

Dalam jangka panjang, imam masjid berperan sebagai **agen komunikasi berkelanjutan** dalam menjaga alam. Pesan ekologis tidak hanya disampaikan saat terjadi bencana, tetapi terus diulang dalam siklus dakwah rutin. Konsistensi ini membentuk **memori kolektif religius** tentang hubungan manusia dan alam.

Melalui pendekatan spiritual, kultural, dan komunikatif, imam masjid di Gayo berkontribusi signifikan dalam membangun ketangguhan masyarakat terhadap bencana berbasis nilai-nilai lokal dan keislaman.

c. Komunikasi aparat kampung di Gayo dalam menjaga alam

Dalam struktur sosial masyarakat Gayo, **aparat kampung**—yang meliputi *reje* (kepala kampung), *sekretaris kampung*, dan unsur *sarak opat*—memiliki peran strategis sebagai **komunikator kebijakan lokal sekaligus penjaga norma adat**. Komunikasi aparat kampung tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga normatif dan kultural, khususnya dalam menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dan alam.

Sistem peringatan dini yang dikombinasikan dengan pengeras suara masjid dan jaringan sosial kampung menunjukkan efektivitas dalam menyebarkan informasi ancaman hujan ekstrem dan potensi longsor.

Komunikasi Sesudah Bencana

Pasca-bencana, tantangan komunikasi meningkat akibat kerusakan infrastruktur dan keterbatasan jaringan komunikasi. Informasi banyak disampaikan melalui komunikasi tatap muka dan jaringan relawan lokal. Tokoh adat dan agama berperan sebagai penenang psikologis sekaligus penyampai informasi resmi kepada masyarakat.

Media massa dan media daring berfungsi menyebarkan informasi bantuan dan kondisi lapangan, namun tetap diperlukan etika komunikasi agar tidak menambah trauma korban.

Setelah terjadinya bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, komunikasi pemerintah menjadi faktor kunci dalam menentukan efektivitas penanganan darurat, pemulihan sosial, serta kepercayaan publik. Pada fase pascabencana, pemerintah tidak hanya dituntut untuk bertindak cepat secara teknis, tetapi juga **mampu berkomunikasi secara transparan, empatik, dan terkoordinasi** dengan masyarakat terdampak.

Komunikasi Informasi Darurat dan Situasi Lapangan

Pada tahap awal pascabencana, pemerintah daerah melalui BPBD, camat, dan aparat kampung menyampaikan informasi terkait:

- kondisi wilayah terdampak,
- jumlah korban dan pengungsi,
- akses jalan dan jembatan yang terputus,
- lokasi pengungsian dan dapur umum.

Komunikasi ini dilakukan melalui berbagai saluran, seperti pengumuman resmi, media massa lokal, media sosial pemerintah daerah, serta koordinasi langsung dengan aparat kampung dan tokoh masyarakat. Di wilayah yang mengalami gangguan listrik dan jaringan, pemerintah mengandalkan **komunikasi tatap muka dan jaringan komunitas lokal** sebagai saluran utama penyampaian informasi.

Koordinasi Antar Lembaga dan Satu Pintu Informasi

Pemerintah berupaya menerapkan prinsip **satu pintu komunikasi** untuk menghindari perbedaan data dan informasi yang simpang siur. BPBD berperan sebagai pusat informasi kebencanaan yang mengoordinasikan data dari dinas terkait, TNI/Polri, relawan, dan lembaga kemanusiaan.

Namun dalam praktiknya, tantangan komunikasi sering muncul berupa:

- perbedaan data jumlah korban dan kerusakan,
- keterlambatan informasi akibat keterbatasan akses,
- persepsi publik tentang ketidaksinkronan antar lembaga.

Situasi ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem komunikasi krisis yang lebih terintegrasi dan adaptif terhadap kondisi geografis wilayah pegunungan.

3. Komunikasi Publik dan Hubungan dengan Media

Pemerintah daerah menggunakan media massa dan media daring untuk menyampaikan perkembangan penanganan bencana serta kebutuhan mendesak masyarakat. Konferensi pers, rilis resmi, dan pernyataan pejabat menjadi sarana komunikasi publik.

Dalam konteks Aceh Tengah dan Bener Meriah, komunikasi pemerintah dengan media diharapkan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga **empatik dan humanis**, agar tidak menimbulkan kesan birokratis di tengah penderitaan korban. Narasi komunikasi yang menekankan solidaritas, gotong royong, dan komitmen pemulihan terbukti lebih diterima oleh masyarakat.

4. Komunikasi Distribusi Bantuan dan Pemulihan Awal

Distribusi bantuan merupakan isu sensitif yang sangat bergantung pada komunikasi. Pemerintah menyampaikan mekanisme penyaluran bantuan melalui aparat kampung dan posko resmi. Aparat kampung berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai:

- jenis bantuan yang tersedia,
- prioritas penerima,
- tahapan distribusi.

Ketika komunikasi berjalan kurang optimal, muncul potensi ketidakpuasan dan kecurigaan di masyarakat. Oleh karena itu, keterbukaan informasi dan pelibatan tokoh adat serta imam masjid menjadi strategi penting dalam menjaga kepercayaan publik.

5. Komunikasi Psikososial dan Pendekatan Kultural

Selain komunikasi administratif, pemerintah juga melakukan komunikasi psikososial melalui kegiatan pendampingan, doa bersama, dan kunjungan pejabat ke lokasi terdampak. Pendekatan ini memiliki makna simbolik yang kuat, karena menunjukkan kehadiran negara di tengah masyarakat.

Di wilayah Gayo, efektivitas komunikasi pemerintah meningkat ketika pesan-pesan resmi disampaikan dengan **memperhatikan kearifan lokal**, bahasa setempat, dan melibatkan tokoh adat serta tokoh agama. Pendekatan kultural ini membantu meredam emosi publik dan memperkuat solidaritas sosial pascabencana.

6. Tantangan dan Evaluasi Komunikasi Pemerintah

Meskipun komunikasi pemerintah pascabencana telah berjalan, beberapa tantangan masih terlihat, antara lain:

- keterbatasan infrastruktur komunikasi di daerah pegunungan,
- kesenjangan informasi antara pusat dan kampung terpencil,
- perlunya peningkatan kapasitas komunikasi krisis aparatur pemerintah.

Evaluasi terhadap pengalaman bencana di Aceh Tengah dan Bener Meriah menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah perlu terus diperbaiki melalui pelatihan komunikasi kebencanaan, integrasi teknologi, dan penguatan kolaborasi dengan struktur sosial lokal.

3 Komunikasi Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal

Komunikasi berkelanjutan diwujudkan melalui penguatan memori kolektif masyarakat tentang bencana. Cerita pengalaman, doa bersama, dan musyawarah kampung menjadi media refleksi sekaligus pembelajaran. Nilai gotong royong masyarakat Gayo terbukti mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi pascabencana.

Integrasi kearifan lokal ke dalam kebijakan komunikasi kebencanaan dinilai penting agar strategi mitigasi dan respons lebih diterima dan dijalankan oleh masyarakat.

5. KESIMPULAN

Artikel ini menegaskan bahwa komunikasi kebencanaan yang efektif harus bersifat kontekstual dan berakar pada budaya lokal. Studi kasus banjir bandang dan longsor di Aceh Tengah dan Bener Meriah menunjukkan bahwa kearifan lokal masyarakat Gayo merupakan modal sosial yang signifikan dalam meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat respons darurat, dan mendukung pemulihan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah dan pemangku kepentingan perlu mengintegrasikan kearifan lokal secara sistematis dalam kebijakan dan praktik komunikasi kebencanaan. Namun, penelitian juga menemukan bahwa komunikasi kebencanaan berbasis kearifan lokal belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem komunikasi formal pemerintah daerah. Koordinasi antara pemerintah dan tokoh adat masih bersifat situasional dan belum terlembagakan. Komunikasi kebencanaan berbasis kearifan lokal memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat Aceh Tengah dan Bener Meriah. Kearifan lokal masyarakat Gayo terbukti menjadi media komunikasi yang efektif dan berkelanjutan. Integrasi antara komunikasi formal pemerintah dan kearifan lokal perlu diperkuat agar penanganan bencana lebih kontekstual dan partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adger, W. N. (2003). Social capital, collective action, and adaptation to climate change. *Economic Geography*, 79(4), 387–404.
- BNPB. (2022). *Indeks Risiko Bencana Indonesia*. Jakarta: BNPB.
- Coppola, D. P. (2015). *Introduction to International Disaster Management*. Oxford: Butterworth-Heinemann.
- Fukuyama, F. (2001). Social capital, civil society and development. *Third World Quarterly*, 22(1), 7–20.
- Hasan, N. (2019). Kearifan lokal masyarakat Aceh dalam mitigasi bencana. *Jurnal Ilmu Sosial*, 18(2), 145–158.
- Lestari, P., Prasetyo, A., & Nugroho, Y. (2018). Komunikasi bencana di Indonesia. *Jurnal Komunikasi*, 12(1), 1–15.
- Mileti, D. S., & Sorensen, J. H. (1990). *Communication of emergency public warnings*. Oak Ridge: ORNL.

*Komunikasi Kebencanaan Berbasis Kearifan Lokal
(Studi Kasus Banjir Bandang dan Longsor Aceh Tengah dan Bener Meriah)*

- Norris, F. H., Stevens, S. P., Pfefferbaum, B., Wyche, K. F., & Pfefferbaum, R. L. (2008). Community resilience. *American Journal of Community Psychology*, 41(1), 127–150.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone*. New York: Simon & Schuster.
- Rachmawati, R. (2020). Komunikasi risiko bencana berbasis komunitas. *Jurnal Penanggulangan Bencana*, 11(2), 89–101.
- Rasyid, A. (2017). Nilai adat Gayo dalam pelestarian lingkungan. *Jurnal Kebudayaan Aceh*, 5(1), 33–46.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations*. New York: Free Press.
- Setyowati, D. L. (2019). Banjir bandang dan perubahan lingkungan. *Jurnal Geografi*, 16(1), 55–66.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- UNDRR. (2015). *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction*. Geneva: United Nations.